

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II.1 Kondisi Geografis

Keberadaan Provinsi Jawa Timur merupakan proses sejarah panjang dari adanya wilayah dan pemerintahan yang memiliki struktur dan sistem sesuai perkembangan pada zamannya. Pembentukan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007, tanggal 7 Agustus 2007, tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, menetapkan tanggal 12 Oktober 1945 sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.

Provinsi Jawa Timur terletak pada 111°0' hingga 114°4' Bujur Timur, dan 7°12' hingga 8°48' Lintang Selatan. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur mencapai 46.428 km², terbagi ke dalam empat badan koordinasi wilayah (Bakorwil), 29 kabupaten, sembilan kota, dan 658 kecamatan dengan 8.457 desa/kelurahan (2.400 kelurahan dan 6.097 desa).

Secara umum wilayah Jawa Timur terbagi dalam dua bagian besar, yaitu Jawa Timur daratan hampir mencakup 90% dari seluruh luas wilayah Provinsi Jawa Timur, dan wilayah Kepulauan Madura yang sekitar 10% dari luas wilayah Jawa Timur. Di sebelah utara, Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Di sebelah selatan berbatasan dengan perairan terbuka, Samudera Indonesia, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Panjang bentangan barat-timur sekitar 400 kilometer. Lebar bentangan utara-selatan di bagian barat sekitar 200 kilometer, sedangkan di bagian timur

lebih

lebih sempit, hanya sekitar 60 kilometer. Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, dipisahkan dengan daratan Jawa oleh Selat Madura. Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer sebelah utara Jawa. Di sebelah timur Madura terdapat gugusan pulau, paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Di bagian selatan terdapat dua pulau kecil, Nusa Barung dan Pulau Sempu.

Provinsi Jawa Timur dapat dibedakan menjadi tiga wilayah dataran, yakni dataran tinggi, sedang, dan rendah. Dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian rata-rata di atas 100 meter dari permukaan laut (Magetan, Trenggalek, Blitar, Malang, Batu, Bondowoso). Dataran sedang mempunyai ketinggian 45-100 meter di atas permukaan laut (Ponorogo, Tulungagung, Kediri, Lumajang, Jember, Nganjuk, Madiun, Ngawi). Kabupaten/kota (20) sisanya berada di daerah dataran rendah, yakni dengan ketinggian di bawah 45 meter dari permukaan laut.

Surabaya sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur merupakan kota yang letaknya paling rendah, yaitu sekitar 2 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kota yang letaknya paling tinggi dari permukaan laut adalah Malang, dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut.

Secara fisiografis, wilayah Provinsi Jawa Timur dapat dikelompokkan dalam tiga zona: zona selatan-barat (plato), merupakan pegunungan yang memiliki potensi tambang cukup besar; zona tengah (gunung berapi), merupakan daerah relatif subur terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi (dari Ngawi, Blitar, Malang, hingga Bondowoso); dan zona utara dan Madura (lipatan), merupakan daerah relatif kurang subur (pantai, dataran rendah dan pegunungan). Di bagian utara (dari Bojonegoro, Tuban, Gresik, hingga Pulau Madura) ini terdapat Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng yang relatif tandus.

Pada bagian tengah wilayah Jawa Timur terbentang rangkaian pegunungan berapi: Di perbatasan dengan Jawa Tengah terdapat Gunung Lawu (3.265 meter).

Di sebelah

Di sebelah selatan Nganjuk terdapat Gunung Wilis (2.169 meter) dan Gunung Liman (2.563 meter). Pada koridor tengah terdapat kelompok Anjasmoro dengan puncak-puncaknya Gunung Arjuno (3.239 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), Gunung Anjasmoro (2.277 meter), Gunung Wayang (2.198 meter), Gunung Kawi (2.681 meter), dan Gunung Kelud (1.731 meter). Pegunungan tersebut terletak di sebagian Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang.

Kelompok Tengger memiliki puncak Gunung Bromo (2.192 meter) dan Gunung Semeru (3.676 meter). Semeru, dengan puncaknya yang disebut Mahameru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Di bagian timur terdapat dua kelompok pegunungan: Pegunungan Iyang dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 meter), dan Pegunungan Ijen dengan puncaknya Gunung Raung (3.332 meter). Pada bagian selatan terdapat rangkaian perbukitan, yakni dari pesisir pantai selatan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, hingga Malang. Pegunungan Kapur Selatan merupakan kelanjutan dari rangkaian Pegunungan Sewu di Yogyakarta.

Dua sungai terpenting di Jawa Timur adalah Sungai Brantas (290 km), dan Bengawan Solo. Sungai Brantas memiliki mata air di daerah Malang. Sesampai di Mojokerto, Sungai Brantas pecah menjadi dua: Kali Mas dan Kali Porong. Keduanya bermuara di Selat Madura. Bengawan Solo berasal dari Jawa Tengah, akhirnya bermuara di Gresik. Di lereng Gunung Lawu di dekat perbatasan dengan Jawa Tengah terdapat Telaga Sarangan, sebuah danau alami. Bendungan utama di Jawa Timur antara lain Bendungan Sutami dan Bendungan Selorejo, yang digunakan untuk irigasi, pemeliharaan ikan, dan pariwisata.

Jawa Timur memiliki iklim tropis basah. Dibandingkan wilayah Pulau Jawa bagian barat, Jawa Timur pada umumnya memiliki curah hujan lebih sedikit. Curah hujan rata-rata 1.900 mm per tahun, dengan musim hujan selama 100 hari. Suhu rata-rata berkisar 21-34°C. Suhu di daerah pegunungan lebih rendah, bahkan

bahkan di daerah Ranu Pane (lereng Gunung Semeru), suhu bisa mencapai minus 4°C, yang menyebabkan turunnya salju lembut.

Suhu tertinggi terjadi pada Oktober dan November (35,3°C), dan terendah di bulan Agustus (19,3°C) dengan kelembaban 39%-97%. Tekanan udara tertinggi di bulan Agustus sebesar 1.012,0 Milibar. Jumlah curah hujan terbanyak terjadi di bulan Februari. Rata-rata penyinaran matahari terlama di bulan Agustus, sedangkan terendah di bulan April. Kecepatan angin tertinggi terjadi di bulan Oktober, dan terendah di bulan April.

II.2 Kondisi Demografis

Jawa Timur merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, pada 2008 mencapai 37.094.836 jiwa, dengan laju pertumbuhan 0,54%. Pada 2007 jumlah penduduk Jawa Timur tercatat sebanyak 36.895.571 jiwa (51% di antaranya adalah perempuan), dengan kepadatan penduduk 814 jiwa/km². Kepadatan penduduk di kota umumnya lebih tinggi dibanding di kabupaten. Kota Surabaya memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yakni 8.335 jiwa/km², sekaligus mempunyai jumlah penduduk terbesar, yaitu 2.720.156 jiwa, diikuti Kabupaten Malang (2.442.422 jiwa), dan Kabupaten Jember (2.293.740 jiwa).

Pada 2007, laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan menjadi 0,56%, kemudian menurun menjadi 0,54% pada 2008. Penurunan laju pertumbuhan penduduk, antara lain, karena keberhasilan dalam mengendalikan angka kelahiran.

Kabupaten dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi (di atas 1%) pada periode 2007-2008 adalah Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebesar 1,24%, disusul Kabupaten Jombang (1,25%), Kota Probolinggo (1,71%); Kabupaten Gresik (1,77%); Kabupaten Bangkalan (1,77%); Kabupaten Sampang (1,93%); dan

Kabupaten

Kabupaten Pamekasan (2,02%). Sedangkan daerah dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Kabupaten Madiun (0,02%); Kabupaten Blitar (0,03%); dan Kabupaten Kediri (0,04%).

Laju pertumbuhan penduduk Kota Surabaya juga tergolong relatif rendah, yakni 0,07%. Kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi dan sentra kegiatan ekonomi Jawa Timur yang memiliki faktor penarik untuk menjadi daerah tujuan bagi para pencari kerja, pertumbuhan penduduknya sudah semakin jenuh, karena itu para pendatang umumnya mencari domisili di kabupaten/kota sekitarnya.

Penduduk Jawa Timur mayoritas (46,18%) memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, selebihnya bekerja di sektor perdagangan (18,80%), sektor jasa (12,78%), dan sektor industri (12,51%).

Etnisitas di Jawa Timur relatif heterogen, mayoritas penduduk adalah suku Jawa. Suku Madura mendiami Pulau Madura dan daerah bagian timur, terutama di daerah pesisir utara dan selatan. Di sejumlah kawasan timur, suku Madura, termasuk Pendalungan (campuran Jawa dan Madura), merupakan mayoritas. Suku Madura tersebar hampir di seluruh kota di Jawa Timur, umumnya mereka bekerja di sektor informal. Suku Tengger, yang keturunan pelarian Kerajaan Majapahit, tersebar di Pegunungan Tengger dan sekitarnya. Suku Osing tinggal di sebagian wilayah Kabupaten Banyuwangi. Suku Bali juga bermukim di sejumlah desa di Kabupaten Banyuwangi. Orang Samin tinggal di sebagian pedalaman Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, penduduk keturunan Tionghoa dan Arab juga tersebar di hampir semua wilayah kabupaten/kota Jawa Timur. Juga warga ekspatriat, terutama tinggal di Kota Surabaya, dan sejumlah kawasan industri lainnya.

Penduduk Jawa Timur mayoritas beragama Islam (95,76%). Sedangkan penduduk yang beragama Kristen Protestan sebesar 1,98%; Katolik (0,98%); Hindu (0,94%); Budha (0,29%); dan lainnya (0,05%).

II. 3. Kondisi

II.3. Kondisi Makro Ekonomi

Jawa Timur merupakan barometer perekonomian nasional setelah DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat, sebab kontribusi PDRB Jawa Timur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional mencapai sekitar 16%. Perekonomian Jawa Timur ditopang tiga sektor utama, yaitu perdagangan, industri, dan pertanian.

II.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) pada periode 2003-2008 menunjukkan kecenderungan terus meningkat sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian. Pada 2004 sebesar Rp 341.065 miliar; 2005 (Rp 403.392 miliar); 2006 (Rp 470.627 miliar); 2007 (Rp 534.919 miliar); dan pada 2008 (Rp 621.582 miliar).

Sedangkan berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2000, menunjukkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus membaik, meski pada 2006 terjadi sedikit perlambatan dibanding 2005, namun pada 2007 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur meningkat kembali. Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada 2006, antara lain, disebabkan dampak negatif kenaikan harga BBM dua kali, dan cukai rokok pada 2005, serta ditambah dampak luapan lumpur panas Lapindo.

Pada 2003, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur hanya sebesar 4,78%, kemudian meningkat menjadi 5,83% pada 2004, dan meningkat tipis menjadi 5,84% pada 2005. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,80% pada 2006, namun pada tahun berikutnya (2007) meningkat menjadi 6,11%. Tapi pada 2008, pertumbuhan ekonomi kembali melambat menjadi 5,90%, meski masih di atas angka pertumbuhan 2005. Melemahnya pertumbuhan ekonomi 2008 antara lain disebabkan dampak krisis ekonomi global.

II.3.2 Pertumbuhan

II.3.2 Pertumbuhan Sektoral

Pertumbuhan ekonomi 2003 yang sebesar 4,78% sebagian besar didukung oleh pertumbuhan sektor listrik, gas, dan air bersih (15,52%); sektor perdagangan, hotel dan restoran (7,92%); sektor pengangkutan (5,78%), dan sektor industri yang merupakan pendukung utama perekonomian Jawa Timur 2003 hanya tumbuh sebesar 4,46%.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2004 mulai menembus angka 5%, menjadi 5,83%. Pertumbuhan ini didorong oleh seluruh sektor ekonomi yang semuanya mengalami peningkatan, terutama sektor listrik, gas, dan air bersih (14,86%); sektor perdagangan, hotel dan restoran (9,25%); sektor pengangkutan dan komunikasi (6,77%); sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (5,94%); dan sektor industri yang tumbuh mencapai 5,28%. Sektor lainnya meski mengalami pertumbuhan, tapi rata-rata masih di bawah 4%.

Pertumbuhan ekonomi 2005 dibanding 2004 hanya meningkat tipis sebesar 0,1%. Dari 5,83% pada 2004 menjadi 5,84% pada 2005. Pertumbuhan ekonomi pada 2005 ini dapat dikatakan relatif stagnan, akibat kenaikan harga BBM dan cukai rokok pada 2005, dan munculnya dampak semburan lumpur Lapindo. Pada 2005, hampir semua sektor mengalami perlambatan pertumbuhan, kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh menjadi 9,32%. Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang menjadi pendukung utama pertumbuhan melambat menjadi 9,15%; begitu pula sektor listrik, gas, dan air bersih (6,18%), dan sektor pengangkutan dan komunikasi (5%). Sektor industri juga melambat menjadi 4,61%.

Pada 2006, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur melambat menjadi 5,80%, yang sebelumnya pada 2005 sebesar 5,84%. Dampak kenaikan harga BBM pada 2005 mulai terasa pengaruhnya terhadap sektor industri dan sektor konstruksi, ditambah munculnya dampak semburan lumpur panas Lapindo. Pertumbuhan

kedua

kedua sektor tersebut melambat menjadi 3,05%, dan 1,42%. Perlambatan pertumbuhan juga dialami hampir semua sektor, kecuali sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tumbuh menjadi 9,62%.

Dampak kenaikan harga BBM dan berlanjutnya dampak lumpur panas Lapindo tidak menghalangi perekonomian Jawa Timur untuk tetap tumbuh pada 2007. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2007 meski tertatih-tatih, merangkak naik menjadi 6,11%, atau naik 0,31%. Kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi pada 2007 berasal dari sektor listrik, gas dan air bersih, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran, yang masing-masing tumbuh menjadi 11,81% dan 8,39%.

Pada 2008, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur kembali melambat menjadi 5,90%, atau melemah 0,21% dibanding 2007. Hampir seluruh sektor mengalami perlambatan pertumbuhan, kecuali sektor pertambangan dan penggalian. Sektor ini tumbuh menjadi 9,26%, yang pada 2007 hanya mencapai 10,44%. Sedangkan pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang pada 2007 sebesar 8,39%, melemah menjadi 8,27%. Sektor listrik, gas dan air bersih yang pada 2007 tumbuh sebesar 11,81%, anjlok menjadi 3,11%.

Pertanian yang diharapkan menjadi sektor unggulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 2008, ternyata mengalami perlambatan akibat kemarau panjang. Pertumbuhan sektor industri pengolahan juga melambat akibat menurunnya permintaan dari negara-negara tujuan ekspor. Pada 2008, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 16,57% terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku), atau terbesar ketiga setelah sektor perdagangan, hotel, dan restoran (29,36%), dan industri pengolahan (28,49%).

II.3.3 PDRB

II.3.3 PDRB per Kapita

Perkembangan PDRB per kapita tahun dasar 2000 periode 2003-2007 menunjukkan kecenderungan terus meningkat, karena pertumbuhan PDRB ADHB lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk.

Pada 2003, PDRB per kapita Jawa Timur mencapai Rp 8,30 juta, kemudian meningkat menjadi Rp 9,40 juta pada 2004. Kenaikan harga BBM pada 2005 ternyata relatif tidak menghambat pergerakan kenaikan PDRB per kapita, sehingga pada tahun tersebut mampu meningkat menjadi Rp 11,06 juta.

Kecenderungan peningkatan PDRB per kapita ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2006, PDRB per kapita meningkat menjadi Rp 12,83 juta, kemudian menjadi Rp 14,50 juta pada 2007, dan terus meningkat menjadi Rp 16,76 juta pada 2008.

II.3.4 Peran APBD terhadap PDRB

Pembangunan daerah, sebagai bagian integral pembangunan nasional, selain berkepentingan terhadap penyelenggaraan pembangunan sektoral nasional di daerah, juga berkepentingan terhadap pembangunan dalam dimensi kewilayahan. Dua kepentingan tersebut ditujukan meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah. Aktivitas pembangunan daerah berkenaan sekaligus dengan tujuan pencapaian sasaran-sasaran sektoral nasional di daerah, dan tujuan pengintegrasian pembangunan antar-sektor di dalam satu wilayah. Karena itu, pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk perencanaan pembangunan. Penyusunan APBD dilakukan dalam suatu sistem anggaran yang gunanya untuk meningkatkan penyelenggaraan di daerah, baik tugas umum pemerintahan maupun pembangunan.

Jika APBD

Jika APBD merupakan besaran anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah, maka PDRB adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk suatu wilayah pada kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Bila dibandingkan, maka besaran APBD hanya merupakan bagian kecil dari PDRB. Namun demikian, peran APBD dalam perekonomian tidak dilihat dari besar kecil nominalnya, tetapi lebih pada nilai kebijakan yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi (PDRB).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun pada periode 2004-2008 cenderung meningkat. Pada 2005, APBD Provinsi Jawa Timur naik sebesar 15% dibanding tahun sebelumnya. Pada 2006 meningkat sebesar 26% dibanding 2005, dan pada 2007 kembali meningkat sebesar 16% dibanding 2006. Namun pada 2008 justru mengalami penurunan sebesar 10% dibanding 2007. Peningkatan APBD tertinggi terjadi pada periode 2005-2006, yang mungkin disebabkan adanya penyesuaian APBD akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.

Rasio APBD Provinsi Jawa Timur terhadap PDRB dari tahun ke tahun cenderung meningkat, meski tidak terlalu signifikan. Kenyataan itu menunjukkan, kegiatan ekonomi pada periode tersebut relatif stabil. Pada periode 2007-2008, rasio APBD terhadap PDRB menurun, mencapai besaran 0,87%. Angka ini bermakna, kegiatan ekonomi riil pada periode tersebut semakin membaik, karena dengan APBD yang cenderung stabil mampu meningkatkan nilai tambah PDRB. Besaran rasio APBD terhadap PDRB pada 2008 itu menggambarkan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur relatif cukup baik. Angka yang dicapai lebih kecil dibandingkan standar kinerja yang ditetapkan, yakni 1,45%.

Peran Pemerintah Jawa Timur sampai saat ini masih cukup besar, namun besarnya peran pemerintah bukan hanya dinilai dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari dampak positif bagi masyarakat Jawa Timur akibat kebijakan publik yang dibuat. Rasio APBD terhadap PDRB atas dasar harga

berlaku

berlaku (ADHB) pada 2005 menurun dibanding 2004, mencapai 1,00%. Pada 2004, angka rasio sebesar 1,03%. Kemudian pada 2006, angka rasio meningkat kembali menjadi 1,09%, begitu juga pada 2007, meningkat menjadi 1,11%. Namun pada 2008, rasio APBD terhadap PDRB menurun menjadi, 0,87%. Ini artinya, jika peran masyarakat yang disebabkan kebijakan publik yang tepat semakin meningkat, maka persentase peran APBD terhadap PDRB (ADHB) akan semakin menurun.

II.3.5 Daya Beli

Peningkatan PDRB per kapita dari tahun ke tahun sebagai *proxy* pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemajuan perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat antar-kabupaten/kota di Jawa Timur. Namun meningkatnya pendapatan per kapita belum mencerminkan pemerataan distribusi pendapatan regional Jawa Timur di dalam masyarakat.

Untuk itu, indikator daya beli masyarakat dapat digunakan melihat telah terjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi ataukah tidak. Sebab, jika daya beli masyarakat di wilayah tersebut cenderung naik, maka dapat dikatakan telah terjadi peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengonsumsi barang dan jasa.

Peningkatan PDRB per kapita sebagai *proxy* pendapatan per kapita masyarakat diiringi terkendalinya tingkat harga pada 2007, mendorong naiknya tingkat kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dari naiknya daya beli masyarakat. Pada 2007, Indeks Daya Beli (IDB) masyarakat Jawa Timur mencapai 140,35, atau naik 6,15% dibanding 2006.

Kinerja ekonomi Jawa Timur yang membaik pada 2007, antara lain, disebabkan mulai pulihnya daya beli masyarakat, menurunnya laju inflasi, serta makin membaiknya perekonomian. Dampak kenaikan harga BBM mulai dapat

dieliminasi

dieliminasi secara bertahap seiring makin stabilnya kondisi makro ekonomi Jawa Timur pada tahun tersebut.

Namun pada 2008, IDB hanya meningkat tipis menjadi 147,92, atau naik sebesar 5,40% dibanding 2007. Perlambatan peningkatan IDB ini antara lain disebabkan, kenaikan harga minyak dunia yang mencapai 147 dolar AS per barel, sehingga ikut menaikkan harga-harga barang dan jasa domestik. Kondisi ini juga diperparah secara tidak langsung oleh imbas dari krisis awal finansial global (*subprime mortgage*).

Pada 2006, IDB mencapai 132,22, atau meningkat 8,66% dibanding 2005. Makin pulihnya perekonomian Indonesia secara umum pada tahun ini turut mendorong naiknya daya beli masyarakat dalam mengonsumsi barang dan jasa. Sedangkan IDB tahun 2005, hanya meningkat sebesar 2,08% dibanding 2004, dari semula 119,20 (2004) menjadi 121,68 (2005). Persentase peningkatan IDB yang relatif kecil tersebut, antara lain, disebabkan isu kenaikan harga BBM pada tahun tersebut membuat Indeks Harga Konsumen kumulatif 2005 mempengaruhi daya beli masyarakat dalam mengonsumsi barang dan jasa.

Stabilitas harga di Jawa Timur pun relatif terkendali terlihat dari besaran inflasi pada kisaran 6%. Pada 2006, inflasi kumulatif Jawa Timur mencapai 6,76% (nasional: 6,60%), pada 2007 sebesar 6,48% (nasional: 6,59%), dan pada 2008 meningkat menjadi 9,66%. Angka inflasi Jawa Timur 2008 tersebut masih lebih rendah dibanding angka inflasi nasional yang mencapai 11,06%.

Pada Januari 2009, Jawa Timur mengalami deflasi 0,05%. Kondisi ini lebih rendah dibandingkan deflasi nasional yang sebesar 0,07%. Dari 10 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jawa Timur, lima kota mengalami deflasi, dan lima kota sisanya mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Surabaya (0,18%), dan deflasi terendah terjadi di Madiun (0,01%). Inflasi tertinggi terjadi di Malang (0,28%), dan inflasi terendah terjadi di Banyuwangi (0,06%). Pendorong utama

deflasi

deflasi pada Januari 2009 ini adalah akibat turunnya harga bensin, bawang merah, dan solar, sedangkan pendorong utama ke arah inflasi adalah akibat naiknya harga daging ayam ras, beras, dan emas perhiasan.

II.3.6 Disparitas Wilayah

Tingkat kesenjangan ekonomi antar-wilayah di Jawa Timur pada kurun 2003-2008 menunjukkan nilai yang fluktuatif seiring tingkat perubahan PDRB per kapita Jawa Timur, juga dipengaruhi kondisi sosial ekonomi selama kurun tersebut.

Kesenjangan antar-kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sangat dipengaruhi kreativitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk meningkatkan *ouput* daerah, yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan ekonomi, dan mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat setempat. Pemerintah Provinsi berperan menjaga rentang kesenjangan antar-daerah.

Setelah struktur ekonomi secara nasional mengalami kejutan akibat kenaikan harga BBM, yang mendorong tingginya laju inflasi pada 2005 --yang berdampak terhadap semunya nilai PDRB per kapita karena melemahnya daya beli-- kesenjangan antar-wilayah sesudah tahun 2005 yang diukur dengan Indeks Disparitas Williamson (IDW) menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Pada 2005, IDW mencapai 116,25 poin, kemudian menurun menjadi 116,00 poin pada 2006, atau terjadi penurunan sebesar 0,25 poin. Hal yang sama juga terjadi pada 2007, IDW menurun menjadi 115,38 atau terjadi penurunan sebesar 0,62 poin. Penurunan indeks tersebut juga terjadi pada 2008, menjadi 115,61 poin atau naik sebesar 0,23 poin. Kecenderungan penurunan dan kenaikan yang tidak signifikan IDW dari tahun ke tahun tersebut menunjukkan,

pemerataan

pemerataan pembangunan di daerah relatif tidak melahirkan kesenjangan antar-wilayah terlalu mencolok.

Jika menggunakan perspektif perbandingan absolut antar-daerah melalui perbandingan nilai PDRB per kapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap rata-rata capaian Jawa Timur pada 2007, maka akan diperoleh empat kategori daerah.

Pertama, umumnya wilayah perkotaan (Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya) memiliki pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tinggi dan PDRB per kapita tinggi di atas rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sektor Industri, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa ditengarai merupakan sektor-sektor yang berperan sangat penting mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan PDRB per kapita di daerah-daerah tersebut.

Kedua, daerah-daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi PDRB per kapita lebih rendah dibandingkan rata-rata PDRB per kapita Provinsi, menyebar di kabupaten/kota dengan struktur perekonomian yang tidak didominasi sektor tertentu. Pembangunan di daerah-daerah ini hampir merata di semua sektor, sehingga masih sangat terbuka peluang meningkatkan pertumbuhan PDRB per kapita di atas rata-rata PDRB per kapita Provinsi. Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, misalnya, mempunyai sumber daya dan potensi yang masih bisa digali untuk meningkatkan PAD, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Ketiga, PDRB per kapita yang tinggi, tetapi pertumbuhannya rendah, terjadi di Kota Kediri. Keberadaan perusahaan industri rokok berskala nasional di daerah ini boleh jadi merupakan pendorong tingginya nilai PDRB per

kapita

kapita, meski secara empirik tingginya nilai PDRB per kapita tidak benar-benar mencerminkan tingginya pendapatan masyarakat.

Keempat, daerah-daerah yang PDRB per kapitanya rendah sekaligus pertumbuhan ekonominya juga rendah, seperti Kabupaten Pacitan, Trenggalek, dan wilayah Madura, serta sebagian daerah di wilayah Timur. Dari tahun ke tahun daerah-daerah tersebut berada dalam kondisi tersebut. Terobosan arah pembangunan yang signifikan perlu terus diupayakan untuk meningkatkan PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata Provinsi.

II.3.7 Nilai Tukar Petani

Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Januari-Desember 2008 mengalami kenaikan sebesar 0,91%, dari 113,12 pada 2007 menjadi 114,15. Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (14,40%) lebih besar daripada kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (13,36%). Kenyataan ini menunjukkan, rata-rata kesejahteraan petani periode Januari-Desember 2008 secara umum lebih baik dibanding 2007.

Selama 2008, NTP Jawa Timur umumnya lebih tinggi dibanding bulan yang sama pada 2007, kecuali bulan Maret dan Desember. Nilai Tukar Petani terendah terjadi pada Maret 2008, yakni sebesar 112,64. Sedangkan NTP tertinggi terjadi pada bulan September, yaitu 115,78.

Jika dilihat dari besarnya perubahan, kenaikan NTP tertinggi terjadi pada Juli 2008, sebesar 1,26%, karena kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (3,08%) lebih besar dibanding kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (1,08%). Penurunan NTP tertinggi terjadi pada Maret 2008, sebesar 0,68%, karena kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (0,33%) lebih kecil dibanding kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (1,02%).

II.3.8 Nilai

II.3.8 Nilai Tukar Nelayan

Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) selama 2008 berfluktuasi. Jika dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 115,11, maka kenaikan NTN tahun 2008 cukup tinggi, yakni menjadi 139,97. Apabila dilihat nilainya, NTN selama 2008 sudah jauh berada di atas level 100. Ini menunjukkan, perkembangan harga yang diterima nelayan lebih tinggi daripada perkembangan harga yang dibayar nelayan.

Dengan kata lain, perkembangan harga ikan segar yang dihasilkan nelayan masih cenderung lebih tinggi daripada perkembangan harga kebutuhan hidup sehari-hari. Namun perkembangan harga yang tinggi tidak otomatis membuat pendapatan nelayan meningkat, karena hanya dinikmati sebagian kecil nelayan yang memiliki armada dan alat penangkapan ikan yang lebih baik dan modern, sementara para nelayan tradisional tidak dapat menikmati kenaikan harga tersebut.

II.3.9 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan indikator untuk melihat tingkat produktivitas dan efisiensi suatu investasi, yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan menaikkan/menambah satu unit *output*. Semakin kecil nilai ICOR, semakin besar efisiensi dan produktivitas dari investasi yang ditanamkan. Investasi yang sama pada suatu perekonomian dengan ICOR yang lebih rendah akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi semakin tinggi.

Angka ICOR pada 2008 sebesar 3,07. Artinya, untuk menambahkan *output* sebesar 1 unit diperlukan investasi sekitar 3,07 unit. Sedangkan besaran ICOR pada 2007 mencapai 3,05. Dengan demikian, investasi yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit *output* pada 2008 lebih besar jika dibandingkan 2007.

Besaran

Besaran ICOR pada periode 2003-2007 secara berurutan adalah 3,95 (2003); 2,60 (2004); 3,84 (2005); 3,18 (2006); 3,05 (2007); dan 3,07 (2008). Selama lima tahun terakhir, ICOR Jawa Timur rata-rata per tahun adalah 3,15. Angka tersebut mengindikasikan, rata-rata investasi yang ditanamkan sudah cukup efisien --mengingat ICOR negara-negara sedang berkembang secara tipikal berkisar 2,0-5,0.

II.3.10 Ekspor dan Impor Non-Migas

Nilai ekspor non-migas Jawa Timur 2008 mencapai 11,099 miliar dolar AS, atau sedikit menurun dibanding 2007 yang mencapai 11,429 miliar dolar AS. Meski capaian pada 2008 tersebut meningkat sebesar 23,50% dibanding 2006 yang mencapai 8.741 miliar dolar AS. Pencapaian ini menempatkan Jawa Timur pada posisi kedua dalam memberikan kontribusi ekspor nasional, setelah sebelumnya menempati urutan ketiga.

Pesatnya pertumbuhan ekspor ini didukung oleh 10 komoditas utama Jawa Timur, yaitu pengolahan tembaga, timah; kimia dasar; pengolahan kayu; besi baja; pulp dan kertas; makanan dan minuman; tekstil; pengolahan karet; udang dan alat-alat listrik. Kesepuluh komoditas tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap ekspor Jawa Timur, yaitu sebesar 78,10%. Adapun sepuluh negara tujuan utama ekspor Jawa Timur adalah Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, RRC, Thailand, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Australia dan Jerman.

Pada Desember 2008, ekspor Jawa Timur untuk komoditas non-migas mencapai 748.017.058 dolar AS, turun 5,31% dibanding capaian bulan November 2008 yang sebesar 710.272.141 dolar AS. Komoditas utama ekspor Jawa Timur bulan Desember 2008 adalah tembaga, dengan nilai ekspor sebesar 85.615.333 dolar AS, yang menyumbang 11,45% terhadap total nilai ekspor Jawa Timur.

Nilai impor

Nilai impor Jawa Timur pada 2008 mencapai 11,878 miliar dolar AS, sedangkan pada 2007 tercatat sebesar 7,264 miliar dolar AS, atau meningkat dibandingkan 2006, yang mencapai 5,499 miliar dolar AS. Adapun sepuluh komoditas utama impor non-migas Jawa Timur adalah besi baja, kimia dasar, makanan dan minuman, makanan ternak, pulp dan kertas, hasil pertanian, pengolahan aluminium, barang-barang kimia, tekstil dan biji lainnya. Sedangkan sepuluh negara utama asal impor Jawa Timur meliputi Singapura, RRC, Korea Selatan, Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Jepang, India, Thailand dan Taiwan.

Impor Jawa Timur untuk komoditas non-migas pada bulan Desember 2008 sebesar 892.919.735 dolar AS, naik 5,31% dibanding capaian pada November 2008 yang sebesar 831.604.943 dolar AS. Komoditas utama impor Jawa Timur bulan Desember 2008 adalah mesin dan pesawat mekanik, dengan nilai impor sebesar 91.948.312 dolar AS, dan menyumbang 13,27% terhadap total nilai impor Jawa Timur.

II.3.11 Pengangguran Terbuka

Hasil pendataan Badan Pusat Statistik melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tiga tahun terakhir (2006-2008), menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penganggur di Jawa Timur yang cukup berarti. Jumlah penganggur pada 2008 turun 5,14% (70.190 orang), dari semula 1.366.503 orang pada tahun 2007, menjadi 1.296.313 orang. Angka tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur juga menurun. Pada 2006 tercatat sebesar 8,19%, kemudian pada 2007 menurun menjadi 6,79%, dan pada 2008 menjadi 6,42%.

Namun di sisi lain, angka setengah penganggur mencapai 6.247.875 orang pada 2008. Jumlah tersebut meningkat 7,22% dibanding 2007 yang terdapat

5.827.223

5.827.223 orang tergolong setengah penganggur --yaitu mereka yang masuk kategori bekerja tapi belum produktif, atau waktu yang digunakan untuk bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Mereka umumnya bekerja sebagai pekerja bebas atau pekerja keluarga pada sektor pertanian maupun non-pertanian.

Selama 2004-2008, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut jenis kelamin menunjukkan, TPT laki-laki lebih rendah dibanding perempuan. Data Sakernas menunjukkan, umumnya tenaga kerja perempuan selain terserap ke dalam sektor pertanian, juga sektor kerajinan rumah tangga, dan perdagangan/restoran. Sektor industri kerajinan yang banyak dikerjakan perempuan, terutama di pedesaan, antara lain pembuatan anyaman atau topi dari bambu, pembuatan batik tulis, bordir, dan kegiatan informal lainnya. Sedangkan di wilayah perkotaan, perkembangan pusat-pusat perbelanjaan (mal) juga banyak menyerap tenaga kerja perempuan sebagai pramuniaga ataupun kasir.

II.3.12 Incremental Labour Output Ratio (ILOR)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) terus meningkat seiring membaiknya kondisi perekonomian Jawa Timur. Dengan mencermati besaran angka *Incremental Labour Output Ratio* (ILOR) dapat diketahui pengaruh perubahan PDRB (ADHK) terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.

Dari perhitungan rata-rata ILOR per tahun (dengan kenaikan nilai PDRB ADHK 2000), dalam kurun lima tahun (2001-2005) diperoleh perbandingan antara penambahan tenaga kerja dan penambahan besaran atau nilai *output* (ILOR) secara rata-rata 0,03. Sedangkan pada periode 2002-2006, rata-rata besaran

ILOR

ILOR, 0,01. Dan, pada periode lima tahun terakhir (2003-2008), rata-rata besaran ILOR, 0,02.

Dengan demikian perbandingan antara penambahan penyerapan tenaga kerja dan penambahan nilai *ouput* sangat kecil. Besaran ILOR setiap tahunnya sangat bervariasi. Nilai ILOR tertinggi terjadi pada 2004, yakni 0,06, dan tahun 2007 dengan angka besaran ILOR, 0,07. Sedangkan ILOR terendah terjadi pada 2003 dan 2006. Bahkan pada 2006, angka ILOR sebesar 0,00. Artinya, kenaikan *output* tidak dibarengi penambahan jumlah tenaga kerja sama sekali.

Pada 2008, angka ILOR menurun dibanding angka ILOR 2007. Dari semula 0,07 (2007) menjadi sebesar 0,06 pada 2008. Ini artinya, penambahan Rp 100 juta PDRB pada 2007 diikuti penambahan tujuh tenaga kerja, sementara pada 2008 hanya diikuti penambahan enam tenaga kerja.

II.3.13 Pemenuhan Kebutuhan Pangan

Pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan bergerak dengan pola seiring perkembangan tingkat pendapatan/kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan biasanya diikuti turunnya proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan. Dalam keadaan pendapatan yang terbatas, sebagian besar akan lebih diutamakan memenuhi kebutuhan pangan. Bahkan dalam kondisi paling sulit, orang terpaksa mengutamakan pemenuhan kebutuhan makanan pokok, dan mengurangi konsumsi lauk pauk.

Apabila pendapatan rata-rata rumah tangga meningkat, maka akan diikuti perbaikan kualitas makanan yang dikonsumsi. Semakin tinggi pendapatan, maka akan diikuti transformasi struktur konsumsi dari makanan ke non-makanan. Sebab, kebutuhan akan makanan biasanya mencapai titik batas maksimal, sementara kebutuhan bukan makanan hampir tak terbatas.

Berdasarkan

Berdasarkan hasil Susenas 2008, sekitar 54,34% pengeluaran penduduk Jawa Timur digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan, dan sekitar 45,64% untuk kebutuhan non-makanan. Ini artinya, pemenuhan kebutuhan makanan masih mendominasi pengeluaran penduduk Jawa Timur. Selama periode 2006-2008, persentase tersebut relatif stabil.

II.3.14 Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan dipahami tak hanya sebatas masalah kemampuan ekonomi, tapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar, dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk bisa menjalani kehidupan secara bermartabat.

Hak-hak dasar yang harus terpenuhi adalah kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, serta hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Berbagai upaya sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengentas masyarakat miskin, mulai dari bantuan dan perlindungan sosial rumah tangga miskin hingga pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK). Ada tiga kategori penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni, pertama, *rescue* (penyelamatan), upaya jangka pendek yang bertujuan menyelamatkan rumah tangga miskin agar tidak semakin terpuruk akibat kenaikan harga BBM. Upaya penyelamatan ini dilakukan melalui Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan BBM (PAM-DKB). Program ini tidak dimaksudkan mengentas penduduk miskin, tapi hanya mencegah masyarakat miskin tidak semakin terpuruk, dan juga mencegah agar kemiskinan tidak

berekses

berekses ke hal-hal lain. Tujuan utamanya memberikan penghasilan bagi keluarga miskin agar dapat bertahan hidup (*charity*).

Kedua, *recovery* (pemulihan), yaitu upaya jangka panjang untuk pengurangan kemiskinan, bersifat bergulir, penguatan kelembagaan, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi desa, peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Upaya ini dilakukan melalui Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin), Program Pengembangan Ekonomi Kawasan, P3EL, PWTAD, dan lainnya. Dan, ketiga, Program Gerdu-Taskin yang bertujuan mengentas penduduk miskin melalui proses pemandirian masyarakat dengan pendekatan Tridaya (pemberdayaan manusia, usaha dan lingkungan), yang pada 2007 dikembangkan menjadi Jaring Pengaman Ekonomi Sosial (Japes).

Berbagai program penanggulangan kemiskinan tersebut memberikan hasil cukup signifikan. Pada 2005 terdapat 22,51% penduduk miskin di Jawa Timur, kemudian menurun menjadi 19,89% pada 2006. Persentase penduduk miskin menunjukkan kecenderungan terus menurun. Pada 2007, menjadi 18,89%, dan pada 2008 kembali menurun menjadi 16,97%.

Jumlah penduduk miskin terbesar terkonsentrasi di wilayah Pulau Madura. Kabupaten Sampang memiliki penduduk miskin terbesar, yaitu 46,11% dari jumlah penduduknya, disusul Kabupaten Pamekasan (35,73%); Kabupaten Bangkalan (32,02%); dan Kabupaten Sumenep (31,06%). Sedangkan kabupaten lain di luar Madura yang jumlah penduduk miskinnya relatif besar adalah Kabupaten Tuban (25,23%); Kabupaten Ngawi (23,86%); Kabupaten Bojonegoro (22,98%); Kabupaten Nganjuk (22,63%); Kabupaten Lamongan (22,01%); Kabupaten Pacitan (19,19%). Sementara itu di wilayah perkotaan, jumlah penduduk miskinnya relatif rendah, yakni di Kota Probolinggo (9,90%); Kota Surabaya (8,65%); Kota Mojokerto (8,50%); Kota Batu (7,14%); Kota Kediri (6,66%); Kota Blitar (6,14%); Kota Madiun (5,07%); dan Kota Malang (4,19%).

Selama

Selama periode Maret 2007-Maret 2008, penduduk miskin di daerah pedesaan berkurang 239 ribu, sementara di daerah perkotaan berkurang 265,1 ribu orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan tidak banyak berubah. Pada Maret 2008, sebagian besar (65,26%) penduduk miskin berada di daerah pedesaan.

Jika dicermati komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), maka terlihat peran komoditas makanan jauh lebih besar dibandingkan peran komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Pada Maret 2008, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 73,97%. Komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai GK adalah beras, gula pasir, minyak goreng, telur dan mie instan. Untuk komoditas bukan makanan adalah biaya perumahan. Khusus untuk daerah perkotaan, biaya listrik, angkutan dan minyak tanah mempunyai pengaruh cukup besar, sementara untuk daerah pedesaan pengaruhnya relatif kecil.

Persoalan kemiskinan bukan sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Pada periode Maret 2007-Maret 2008, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*), dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 3,91 pada Maret 2007 menjadi 3,38 pada Maret 2008. Demikian pula Indeks Keparahannya Kemiskinan turun dari 1,15 menjadi 0,93 pada periode yang sama. Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan, rata-rata pengeluaran

penduduk

penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di daerah pedesaan jauh lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2008, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk perkotaan hanya 2,34, sementara di pedesaan mencapai 4,38. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan untuk perkotaan hanya 0,61, sementara di pedesaan mencapai 1,23. Dengan demikian, tingkat kemiskinan di daerah pedesaan lebih parah daripada daerah perkotaan.

II.3.15 Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (versi Jawa Timur) selama periode 2003-2008 menunjukkan kenaikan. Pada 2003, IPM Jawa Timur mencapai 63,66, meningkat menjadi 64,49 pada 2004, kemudian berturut-turut meningkat menjadi 66,84 (2005), 66,87 (2006), 68,06 (2007), dan pada 2008 meningkat menjadi 68,92.

Besaran angka IPM menurut wilayah kabupaten/kota sangat bervariasi. Ini tercermin dari makin besarnya *range* antara angka IPM tertinggi dan terendah. Boleh jadi ini disebabkan prioritas sasaran program maupun kebijakan yang diambil masing-masing daerah tidak sama. Kota Surabaya menempati urutan tertinggi dengan IPM sebesar 76,09, yang pada 2007 menempati urutan keempat setelah Kota Madiun, Kota Blitar dan Kota Malang. Sedangkan peringkat terbawah IPM ditempati Kabupaten Sampang (55,47), meski angka IPM tersebut meningkat dibanding tahun 2007 yang sebesar 53,24.

II.4 Kondisi

II.4 Kondisi Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya Jawa Timur secara umum relatif baik, terutama yang menyangkut pelayanan pendidikan, kesehatan, kesalehan sosial, kesetaraan gender, serta keamanan dan ketertiban.

II.4.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan isu sentral dalam pembangunan berpusat pada rakyat karena salah satu premis pentingnya adalah memperbesar pilihan-pilihan bagi rakyat. Melalui pendidikan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kemampuan sumber daya manusia, untuk kemudian dapat dimanfaatkan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Karena itu, komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, sangat besar.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan pemerintah pusat, dan pemerintah kabupaten/kota, sejak 2004 memberikan subsidi biaya minimal pendidikan bagi siswa-siswa sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah negeri maupun swasta. Dengan subsidi pendidikan tersebut diharapkan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak perlu mengalami putus sekolah, sekaligus untuk mendorong keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang telah dicanangkan.

a. Angka Buta Huruf

Program pengentasan buta aksara di Jawa Timur telah berhasil mengentas penduduk buta aksara rata-rata 1% setiap tahun. Dalam kurun waktu lima tahun (2004-2008) terjadi penurunan sebesar 3,24% penduduk berusia 10 tahun ke atas yang buta huruf. Jika pada 2004 persentase angka buta huruf (ABH) 13,94%, maka pada 2008 turun menjadi 10,70%.

Angka

Angka Buta Huruf penduduk laki-laki lebih rendah dibanding ABH perempuan. Namun, kesenjangan ABH ini dari tahun ke tahun makin menyempit. Di kalangan penduduk usia 10 tahun ke atas pada 2004 terdapat kesenjangan sekitar 10,52% antara ABH laki-laki dan perempuan, kemudian menurun menjadi 8,76% pada 2008. Data ini sekaligus menunjukkan, peningkatan jumlah penduduk melek huruf di kalangan perempuan mengalami kemajuan signifikan.

Jika dilihat dari kelompok umur, maka secara umum ABH di kalangan penduduk usia 10-29 tahun masih berada di kisaran 2%. Pada kelompok umur ini pula ABH penduduk laki-laki dan perempuan belum terjadi disparitas. Peningkatan ABH secara mencolok terjadi pada kelompok usia 30 tahun ke atas, yang disertai disparitas ABH penduduk laki-laki dan perempuan.

Disparitas ABH di Jawa Timur pada 2008 tidak hanya terjadi pada perbedaan menurut jenis kelamin dan kelompok umur, tapi juga berdasarkan wilayah pedesaan dan perkotaan. Disparitas ABH menurut wilayah terjadi mulai pada kelompok usia 20 tahun. Angka Buta Huruf masih sangat dominan terjadi di wilayah pedesaan.

b. Angka Partisipasi Sekolah

Untuk mempercepat pencapaian pembangunan di bidang pendidikan, dan juga meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, terutama untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2004 memberikan subsidi minimal pendidikan bagi siswa sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah negeri maupun swasta.

Total anggaran yang disalurkan pada 2007 mencapai lebih dari Rp 365 miliar, bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan kabupaten/kota, dengan alokasi per siswa Rp 15 ribu untuk tingkat SD/MI, dan Rp 20 ribu untuk tingkat SMP/MTs.

Jumlah

Jumlah sasaran untuk tingkat SD/MI sebanyak 1.901.327 siswa, dan tingkat SMP/MTs sebanyak 732.348 siswa.

Subsidi pendidikan tersebut diberikan melalui lembaga/sekolah sebagai pengganti iuran bulanan, yang penyaluran dan pemanfaatannya diserahkan kepada lembaga/sekolah masing-masing melalui persetujuan dewan sekolah. Pemanfaatan subsidi tersebut, antara lain untuk mendukung peningkatan: proses belajar mengajar, pembinaan kesiswaan, kualitas tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, serta mutu pendidikan.

Selama kurun lima tahun (2003-2008) terjadi peningkatan APS usia 7-12 tahun sebesar 1,13%, dari kisaran 97% pada 2003 menjadi 98% pada 2008. Ini artinya, pada 2008, rata-rata setiap 100 anak usia 7-12 tahun, 98 orang di antaranya sedang bersekolah. Satu orang lainnya tidak atau belum pernah bersekolah, dan satu orang sisanya sudah tidak bersekolah lagi, karena putus sekolah maupun tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

Mereka yang termasuk kelompok tidak atau belum pernah sekolah adalah mereka yang benar-benar tidak/belum bersekolah (karena tidak mampu secara ekonomi atau memiliki keterbatasan/disabilitas), dan mereka yang belajar pada pendidikan non-formal (pendidikan keagamaan non-formal, misalnya pondok pesantren).

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, tidak ada perbedaan APS yang berarti antara laki-laki dan perempuan, bahkan memiliki besaran hampir sama mulai tahun 2005. Pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak Januari 2006, meringankan beban pengeluaran ekonomi orangtua untuk membayar SPP/BP3 anaknya yang bersekolah, sehingga APS antara laki-laki dan perempuan memiliki besaran yang hampir sama.

Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi selama 2003-2008 menunjukkan kecenderungan menurun, terutama di kalangan anak laki-laki,

Sedangkan

sedangkan untuk anak perempuan relatif stagnan. Anak-anak yang tidak bersekolah lagi umumnya adalah anak-anak yang sudah menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar dan tidak melanjutkan sekolah lagi, serta anak-anak putus sekolah karena berbagai alasan.

Sedangkan APS pada kelompok usia SMP (13-15 tahun) pada periode 2003-2008, juga cenderung meningkat, dari kisaran 81,99% pada 2003 menjadi 86,66% pada 2008. Ini artinya, rata-rata setiap 100 penduduk berusia 13-15 tahun, 87 orang di antaranya sedang bersekolah, sementara 11 orang lainnya sudah tidak bersekolah lagi, dan/atau belum pernah sekolah.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, terdapat perbedaan APS usia SMP di kalangan laki-laki dan perempuan, terutama pada periode 2003-2005. Namun pada 2005-2008, persentase keduanya memiliki kisaran hampir sama. Ini menunjukkan, akses dan kesempatan penduduk perempuan untuk bersekolah pada jenjang SMP sudah semakin besar.

Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan usia SMP tahun 2008 sebesar 0,49%. Selama periode 2003-2005, angka putus sekolah penduduk perempuan justru lebih tinggi dibanding laki-laki. Namun pada periode 2005-2008, kecenderungan angka putus sekolah di kalangan perempuan dan laki-laki sama-sama menurun secara signifikan.

Angka Partisipasi Sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun (SMA) pada periode 2003-2008 menunjukkan peningkatan. Pada 2003 berada pada kisaran 52%, meningkat menjadi 61% pada 2008. Angka Partisipasi Sekolah penduduk perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, dengan selisih di atas 2%. Padahal sejak Juli 2005 telah dilaksanakan program Bantuan Khusus Murid (BKM) yang merupakan bagian dari kegiatan PKPS-BBM untuk siswa SMA/SMAK/MA/SMLB.

Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah lagi masih di atas 40%. Selama kurun 2003-2008, rata-rata penurunan penduduk usia 16-18

tahun

tahun yang tidak bersekolah lagi hanya sekitar 1% setiap tahunnya. Angka putus sekolah 2004-2008 di kalangan penduduk perempuan dan laki-laki usia 16-18 tahun hampir sama.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 2007 di Jawa Timur telah mencapai 96,84%, melebihi target tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, agar ledakan lulusan SMP/MTs tersebut dapat melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas, maka telah dilakukan penanganan dan persiapan serius pelaksanaan Perintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun, sejak awal 2008.

II.4.2 Kesehatan

Untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, faktor kesehatan menjadi sesuatu yang sangat penting. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat besar untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan.

a. Tenaga dan Sarana Kesehatan

Jumlah tenaga medis yang berada di unit pelayanan kesehatan (rumah sakit umum dan puskesmas) pada 2008 secara umum mengalami peningkatan sebesar 2,3% dibanding 2007. Juga jumlah tenaga paramedis di unit pelayanan kesehatan meningkat sebesar 3,2%. Rasio jumlah tenaga medis dan paramedis terhadap jumlah penduduk Jawa Timur pada 2007 masing-masing adalah 4.730 dan 1.011. Artinya, setiap satu tenaga medis melayani 4.730 penduduk, dan setiap satu tenaga paramedis melayani 1.011 penduduk.

Jumlah fasilitas kesehatan di Jawa Timur pada 2008 meningkat dibanding 2007. Pada 2008 tercatat terdapat 223 rumah sakit umum; 938 puskesmas; 2.280 puskesmas pembantu; 1.175 puskesmas keliling; 5.425 Pondok Bersalin Desa (polindes); dan 44.636 Pos Pelayanan Terpadu (posyandu). Rasio jumlah

puskesmas

puskesmas terhadap penduduk sebesar 1:39.677 jiwa. Rata-rata setiap puskesmas memiliki 1-2 puskesmas pembantu.

Pondok Bersalin Desa merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), keluarga berencana, dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai kemampuan bidan desa. Untuk posyandu, rata-rata setiap desa/kelurahan terdapat lima buah, yang berperan memenuhi kebutuhan kesehatan dasar dan peningkatan status gizi masyarakat. Keberadaan posyandu menyebar sampai tingkat rukun warga dan dusun.

Upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama untuk keluarga miskin dan daerah terpencil, mulai tahun 2006 dilakukan pengembangan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap (Dengan Tempat Perawatan/DTP) sesuai standar. Pembangunan puskesmas DTP diprioritaskan pada puskesmas dengan kunjungan pasien terbanyak, sehingga puskesmas tersebut dapat menjalankan fungsi sebagai pusat rujukan antara yang melayani penderita gawat darurat sebelum dirujuk ke rumah sakit. Pada 2006, pembangunan puskesmas DTP dilakukan terhadap 19 puskesmas di 19 kabupaten/kota, sedangkan pada 2007 untuk 21 puskesmas di 21 kabupaten/kota, yang hingga kini masih dalam proses penyelesaian.

Pada 2007, jumlah kunjungan rawat jalan di puskesmas sebanyak 19.340.858 orang, dan rawat inap puskesmas sebanyak 754.084 orang. Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas dalam mencari pengobatan pada 2007 mencapai 54,40%.

b. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan menurun. Pada 2003, AKB mencapai 42 per 1.000 kelahiran hidup, menurun menjadi 31 per 1.000 kelahiran hidup pada 2008. Angka

kematian

kematian bayi berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibanding bayi perempuan, yaitu 36 untuk bayi laki-laki, dan 27 untuk bayi perempuan pada 2008.

Beberapa kabupaten/kota masih memiliki AKB cukup tinggi, seperti Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, dan wilayah Pulau Madura. Di wilayah tersebut persentase penolong persalinan oleh tenaga medis relatif rendah. Meski selama periode 2003-2008, angka persalinan oleh tenaga medis menunjukkan peningkatan. Terdapat kecenderungan masyarakat untuk beralih dari persalinan yang ditolong tenaga non-medis ke tenaga medis.

Data Susenas 2008 menunjukkan, cakupan persalinan oleh tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya) pada balita usia 0-4 tahun di Jawa Timur mencapai 88,45%. Ini berarti masih terdapat 11,55% masyarakat Jawa Timur yang memanfaatkan tenaga non-medis (dukun bayi atau famili) dalam membantu proses kelahiran. Persentase penolong persalinan oleh tenaga medis di daerah pedesaan lebih rendah dibanding perkotaan. Khusus penolong persalinan oleh tenaga non-medis (dukun bayi) di pedesaan masih mencapai 25,51%.

Data kematian ibu melahirkan di Jawa Timur masih tercatat dalam jumlah kasus, belum diolah menjadi Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran hidup. Pada 2003, tercatat sebanyak 446 kasus kematian ibu maternal, pada 2007 terdapat 349 kasus, dan pada tahun 2008 jumlah ini turun menjadi 326 kasus. Dalam kurun lima tahun, terjadi penurunan sebesar 27% kasus kematian ibu maternal.

c. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Jawa Timur menunjukkan kecenderungan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2007, AHH penduduk Jawa Timur mencapai 68,69 tahun, kemudian meningkat menjadi 69,55 pada

2008

2008. Angka Harapan Hidup perempuan dari waktu ke waktu menunjukkan angka lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 66,81 tahun untuk laki-laki, dan 70,91 tahun untuk perempuan pada 2008.

Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep merupakan wilayah dengan AHH terendah (di bawah 65 tahun), juga merupakan wilayah dengan Angka Kematian Bayi tertinggi di Jawa Timur.

d. Penanggulangan HIV/AIDS

Pada 2005, jumlah kasus HIV/AIDS di Jawa Timur mencapai 724 kasus, 504 di antaranya merupakan kasus baru. Jumlah yang meninggal karena AIDS sebanyak 225 orang. Penularan HIV/AIDS sebagian besar (54,83%) disebabkan penggunaan NAFZA suntik (IDU).

Pada Maret 2007, jumlah penderita HIV/AIDS meningkat menjadi 930 orang, dan jumlah yang meninggal sebanyak 273 orang. Laju pertambahan kasus (*case rate*) juga mengalami peningkatan, jika pada 2005 adalah 2,05, maka pada 2007 meningkat menjadi 2,51.

Jumlah penderita HIV/AIDS di Jawa Timur menduduki peringkat keempat setelah DKI Jakarta, Papua, dan Jawa Barat. Jika dilihat dari sebaran wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur, maka Kota Surabaya menduduki peringkat pertama dengan jumlah penderita 484 orang, disusul Kota Malang (286 orang). Dari jumlah penderita yang 930 orang tersebut, 507 (54,52%) di antaranya adalah pengguna NAFZA suntik (IDU).

Data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2001-2007 menunjukkan, terjadi peningkatan jumlah perempuan usia 15-49 tahun yang menderita HIV/AIDS. Pada 2001 hanya tercatat lima orang perempuan, meningkat menjadi 121 orang pada 2007.

II.4.3 Kesalehan Sosial

Kesalehan sosial dalam hidup bermasyarakat merupakan landasan terciptanya harmoni sosial, baik intra maupun antar-umat beragama, antar-golongan, maupun antar-etnis dan ras.

Penduduk Jawa Timur mayoritas beragama Islam (95,76%). Sedangkan penduduk yang beragama Kristen Protestan sebesar 1,98%; Katolik (0,98%); Hindu (0,94%); Budha (0,29%); dan lainnya (0,05%). Sampai tahun 2007, jumlah tempat ibadah yang ada di Jawa Timur: masjid sebanyak 36.390; langgar/musala 156.902; gereja Protestan 1.936; gereja Katolik 342; pura 397; dan vihara 169. Heterogenitas masyarakat Jawa Timur bukan hanya berdimensi agama, tapi juga etnis dan ras.

Kerusuhan berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) pada 2005 terjadi sebanyak 13 kasus, masing-masing di Kabupaten Malang (2 kasus); dan Kabupaten Probolinggo (11). Pada 2006, menurun menjadi 4 kasus, masing-masing di Kabupaten Probolinggo (1 kasus); Kabupaten Bondowoso (1); dan Kabupaten Sidoarjo (2). Pada 2007, tercatat 4 kasus kerusuhan berlatar belakang SARA, yakni di Kabupaten Sidoarjo (1 kasus); Kabupaten Jember (2); dan Kabupaten Nganjuk (1). Sedangkan pada 2008 hanya terdapat satu kasus kejadian di Kabupaten Pasuruan.

Kasus perkelahian antar-pelajar di Jawa Timur terbanyak terjadi pada 2006, yakni mencapai 19 kejadian. Pada tahun sebelumnya (2005) hanya terjadi lima kasus perkelahian, masing-masing di Kabupaten Situbondo (3 kasus); Kabupaten Tulungagung (1); dan Kabupaten Bojonegoro (1). Pada 2007 tercatat 17 kasus, dan pada 2008 terdapat 10 kasus.

Sedangkan indeks korban kekerasan di Jawa Timur pada 2008 menurun tipis (1%) dibanding 2007. Semula pada 2007, terdapat korban kekerasan

sebanyak

sebanyak 4.561 orang, kemudian menurun menjadi 3.672 orang pada 2008. Korban kekerasan ini meliputi pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, penganiayaan berat, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Konflik antar-nelayan juga terjadi di Jawa Timur, terutama yang berkaitan batas wilayah tangkapan, dan perebutan pengelolaan tanah oloran di daerah pantai. Jumlah konflik antar-nelayan terbanyak terjadi pada 2005, yaitu 12 kasus, dengan korban 15 orang. Kemudian menurun dari tahun ke tahun, pada 2008 tercatat tujuh kasus dengan korban 6 orang. Pada 2006, masih terdapat enam kasus, dan tujuh kasus pada 2007.

II.4.4 Keamanan dan Ketertiban

Keamanan dan ketertiban merupakan landasan utama menciptakan situasi dan kondisi Jawa Timur aman dan damai. Rasa aman dan tenteram merupakan prasyarat bagi berputarnya roda pembangunan ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Meningkatnya jumlah kejahatan merupakan gangguan serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Jumlah tindak kejahatan di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada 2004 terjadi 15.576 kasus, kemudian meningkat menjadi 29.694 kasus pada 2005, meningkat lagi menjadi 45.206 pada 2006, dan pada 2007 menurun menjadi 36.466 kasus. Jumlah korban kejahatan pun merangkak naik, dari semula 9.999 orang pada 2005, meningkat menjadi 13.863 orang pada 2006, dan naik lagi menjadi 19.737 orang pada 2007. Jenis kejahatan yang mencolok pada 2008 adalah pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor. Rata-rata kejadian tindak kejahatan pada 2008 adalah 2.595 setiap bulan, sedangkan pada 2007 mencapai 3.039 kejadian.

Tindak kejahatan lainnya yang juga cenderung meningkat adalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Pada 2008, jumlah kasus

penyalahgunaan

penyalahgunaan dan peredaran narkoba sebanyak 1.753. Jumlah kasus tersebut menurun dibanding 2007 yang mencapai 2.397 kasus. Sebagian besar (49,14%) kasus narkoba terjadi di Kota Surabaya.

Sementara itu gangguan terhadap keamanan dan ketertiban juga terjadi dalam bentuk kerusuhan berlatar belakang politik. Dalam lima tahun terakhir ini, hanya terjadi dua kasus, masing-masing pada 2005 di Kabupaten Tuban, dan di Kabupaten Banyuwangi (2006). Pada 2007 juga terjadi konflik sosial antara aparat dan penduduk di Pasuruan, karena persoalan tanah, yang menimbulkan korban jiwa. Pada 2008, tercatat kejadian konflik sebanyak 19 kasus, yang terjadi karena persoalan lama yang belum terselesaikan tuntas.

II.4.5 Kesenjangan Gender

Ketimpangan gender dalam penyelesaian pendidikan semakin tereduksi. Dalam kurun tujuh tahun (2001-2007), rasio penduduk yang menamatkan pendidikan minimal sekolah dasar meningkat dari rata-rata 87 orang penduduk perempuan setiap 100 penduduk laki-laki pada 2001, menjadi rata-rata 91 penduduk perempuan setiap 100 penduduk laki-laki. Bahkan di beberapa wilayah kabupaten/kota, rasio penyelesaian pendidikan minimal sekolah dasar penduduk perempuan lebih tinggi daripada penduduk laki-laki.

Berdasarkan hasil Susenas 2001-2007, rasio melek huruf penduduk perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun berkisar 96%-102%. Pada 2007, rata-rata terdapat 101 penduduk perempuan yang melek huruf setiap 100 penduduk laki-laki.

Kontribusi upah/gaji penduduk perempuan di sektor non-pertanian selama 2001-2007, kurang dari 30%. Padahal kontribusi pekerja perempuan di sektor non-pertanian selalu di atas 30%. Kenyataan ini menunjukkan, besaran upah/gaji

Yang diterima

yang diterima penduduk perempuan di sektor non-pertanian masih lebih kecil dibandingkan penduduk laki-laki.

Pada tataran pemerintahan, peran perempuan sudah menunjukkan perkembangan positif, setidaknya sudah terdapat tiga kabupaten dipimpin bupati perempuan (Nganjuk, Banyuwangi, dan Tuban). Namun keanggotaan perempuan di parlemen (DPRD) dalam kurun 2001-2007 masih pada kisaran 2,2%-16%. Persentase terbesar keanggotaan perempuan dalam DPRD ditempati Kota Pasuruan, dari 21 anggota DPRD, empat (19,05%) di antaranya adalah perempuan.

II.5 Kondisi Pemerintahan dan Sosial Politik

II.5.1 Kondisi Pemerintahan

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota; dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan kembali organisasi dinas daerah Provinsi Jawa Timur.

Jumlah dinas di Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 20, terdiri Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, Dinas Pendidikan; Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM); Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan; Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; Dinas Pekerjaan Umum Pengairan; Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang; Dinas Pertanian;

Dinas

Dinas Perkebunan; Dinas Peternakan; Dinas Perikanan dan Kelautan; Dinas Kehutanan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral; dan Dinas Pendapatan.

Sedangkan Sekretariat Daerah terdiri Asisten Pemerintahan membawahi Biro Administrasi Pemerintahan Umum, Biro Administrasi Kerjasama, dan Biro Hukum; Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi Biro Administrasi Perekonomian, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Administrasi Sumber Daya Alam; Asisten Kesejahteraan Masyarakat membawahi Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Kemasyarakatan; dan Asisten Administrasi Umum membawahi Biro Organisasi, Biro Keuangan, Biro Humas Protokol dan Biro Umum.

Sementara itu, badan yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terdiri Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas), Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Lingkungan Hidup, Badan Penanaman Modal, Badan Ketahanan Pangan, Badan Arsip dan Perpustakaan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jatim Wilayah I-IV, Kantor Perwakilan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Narkoba, Sekretariat Dewan Provinsi Korpri, serta Sekretariat Komisi Penyiaran Independen Daerah.

Jumlah pegawai negeri sipil di Jawa Timur sampai 2007 mencapai 448.170 orang, terdiri 261.592 laki-laki (58,4%), dan 186.578 perempuan (41,6%). Jika dilihat dari golongan/kebangkutan, jumlah terbanyak ditempati oleh pegawai negeri sipil golongan III sebanyak 209.339 orang (46,71%); disusul golongan IV, 128.358 (28,64%); golongan II, 97.409 (21,73%); dan golongan I, 14.897 (3,32%).

Hasil studi

Hasil studi sosial BPS Provinsi Jawa Timur 2007 mengenai pelayanan publik menunjukkan, sebagian besar responden menyatakan adanya peningkatan kualitas pelayanan pada fasilitas publik. Peningkatan pelayanan itu meliputi kemudahan prosedur pengurusan (62,87%), kesesuaian persyaratan (62,81%), keadilan dalam mendapatkan layanan (60,68%); kewajaran biaya (72,06%), kenyamanan di tempat pelayanan (79%), dan keamanan di tempat pelayanan (89,32%). Secara umum, sekitar 69,93% responden mengaku penyelenggaraan pelayanan pada fasilitas publik adalah memuaskan. Variabel yang dipandang belum memuaskan meliputi, kecepatan layanan (51,78%), kesesuaian biaya (48,62%), dan ketepatan waktu layanan (55,03%).

II.5.2 Kondisi Sosial Politik

Pemilihan Umum 2004 menghasilkan komposisi perolehan kursi partai politik di DPRD Provinsi Jawa Timur 2004-2009 sebagai berikut: Partai Kebangkitan Bangsa (31 kursi); Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (24 kursi); Partai Golkar (15 kursi); Partai Demokrat (10 kursi); Partai Persatuan Pembangunan (8 kursi); Partai Amanat Nasional (7 kursi); Partai Keadilan Sejahtera (3 kursi); Partai Bulan Bintang (1 kursi); dan Partai Damai Sejahtera (1 kursi).

Sedangkan perolehan suara Pemilihan Umum (legislatif) 2004 untuk DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut: Partai Kebangkitan Bangsa (30,7%); Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (20,9%); Partai Golkar (13,2%); Partai Demokrat (7,3%); Partai Persatuan Pembangunan (6,9%); Partai Amanat Nasional (4,9%); Partai Keadilan Sejahtera (2,9%); Partai Bulan Bintang (1,3%); dan Partai Damai Sejahtera (1,1%); dan Lain-lain (10,8%).

Pengaduan masyarakat ke DPRD Provinsi Jawa Timur pada 2007 mencapai 348 buah, terdiri pengaduan melalui surat sebanyak 297, dan sisanya

51 pengaduan melalui unjuk rasa langsung. Pengaduan rakyat yang masuk ke DPRD Provinsi Jawa Timur pada 2007 meningkat dibanding 2006, yang mencapai 296 buah. Pada 2008, jumlah pengaduan yang masuk menurun menjadi 247 buah.

Kehidupan sosial politik masyarakat Provinsi Jawa Timur sangat dinamis, namun relatif terkendali dan aman. Hal ini terbukti dari pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Timur pada 2008 yang berlangsung sampai dua kali putaran (Juli dan November 2008), kemudian melahirkan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, dan diputuskan penghitungan ulang di Kabupaten Pamekasan (Desember 2008), dan pencoblosan ulang di kabupaten Bangkalan dan Sampang (Januari 2009). Meski suhu politik Jawa Timur selama berlangsungnya Pemilihan Gubernur sempat memanas, namun tidak sampai menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan.

Jumlah organisasi masyarakat yang tercatat pada Badan Kesatuan Bangsa sampai 2007, meliputi lembaga swadaya masyarakat sebanyak 287 buah, organisasi profesi (64), dan organisasi pemuda (63).

II.6 Kondisi Prasarana Wilayah

Pada 2007, panjang jalan raya di Jawa Timur mencapai 3.900,19 kilometer, terbagai atas jalan nasional (1.899,21 km), dan jalan Provinsi (2.000,98 km). 16,06% Dari total panjang jalan tersebut, 16,06% di antaranya dalam kondisi baik, kemudian 65,18% lainnya dalam kondisi sedang, dan sisanya sebesar 18,76% dalam kondisi rusak ringan dan berat.

Jika dilihat panjang jalan Provinsi yang 2.000,98 km, maka 5,35% (107,09 km) di antaranya dalam kondisi rusak berat; dan 14,58% (291,68 km) rusak ringan; 75,50% (1.510,63 km) dalam kondisi sedang; dan 4,58% (91,58 km) sisanya dalam kondisi baik.

Total

Total jumlah jembatan di Jawa Timur 2.740 buah, dengan panjang 34.385 meter, yang terbagi atas jembatan nasional sebanyak 1.306 buah dengan panjang 21.365 meter, dan jembatan Provinsi 1.216 buah dengan panjang 13.018 meter. Dari total jumlah jembatan tersebut, 2.491 buah (90,91%) atau sepanjang 31.463 meter di antaranya dalam kondisi baik.

Pelanggaran terhadap ketentuan batas muatan kendaraan ikut mempercepat kerusakan prasarana transportasi jalan raya. Pada 2007, dari 15 jembatan timbang yang ada di Jawa Timur, tercatat 1.355.692 unit kendaraan yang melakukan pelanggaran kelebihan muatan.

Prasarana jalan dan jembatan didukung pula dengan prasarana perkeretaapian untuk memperlancar perpindahan orang/barang secara massal, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, serta sebagai pendorong dan penggerak pembangunan. Jaringan jalan rel kereta api yang beroperasi pada 2007, sepanjang 986,307 kilometer, terdiri dari lintasan raya 865,139 kilometer, dan lintasan cabang 121,168 kilometer.

Sistem perkeretaapian di Jawa Timur telah dibangun sejak era kolonialisme Hindia-Belanda. Jalur kereta api di Jawa Timur terdiri atas jalur utara (Surabaya Pasar Turi-Semarang-Jakarta), jalur tengah (Surabaya Gubeng-Yogyakarta-Jakarta), jalur lingkar selatan (Surabaya Gubeng-Malang-Blitar-Kertosono-Surabaya), dan jalur timur (Surabaya Gubeng-Jember-Banyuwangi). Jawa Timur juga memiliki sistem transportasi kereta komuter dengan rute Surabaya-Sidoarjo-Porong, Surabaya-Lamongan-Babat, Surabaya-Mojokerto, dan Malang-Kepanjen.

Pelabuhan Internasional Tanjung Perak adalah pelabuhan utama yang berada di Surabaya. Pelabuhan berskala nasional, regional, dan lokal lainnya meliputi Pelabuhan Gresik di Kabupaten Gresik, Pelabuhan Tanjung Wangi di Kabupaten Banyuwangi, Pelabuhan Tanjung Tembaga di Kota Probolinggo, Pelabuhan Pasuruan di Kota Pasuruan, Pelabuhan Sapudi di Kabupaten

Sumenep, Pelabuhan Kalbut di Kabupaten Situbondo, Pelabuhan Sapeken di Kabupaten Sumenep, Pelabuhan Brondong di Kabupaten Lamongan, Pelabuhan Paiton di Kabupaten Probolinggo, Pelabuhan Bawean di Kabupaten Gresik, serta Pelabuhan Kangean di Kabupaten Sumenep

Jawa Timur memiliki sejumlah pelabuhan penyeberangan, yakni Ujung-Kamal (menghubungkan Surabaya dan Pulau Madura) dan Pelabuhan Ketapang (menghubungkan Banyuwangi dan Gilimanuk, Bali), Pelabuhan Kalianget (menghubungkan Madura dan wilayah kepulauan), serta Pelabuhan Jangkar di Situbondo. Pembangunan jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Pulau Madura saat ini memasuki tahap penyelesaian akhir, diperkirakan pada 2009 ini dapat dioperasikan.

Bandara Internasional Juanda di Waru, Sidoarjo menghubungkan Jawa Timur dengan kota-kota besar di Indonesia dan luar negeri. Bandara lainnya adalah Bandara Abdul Rachman Saleh di Kabupaten Malang, Bandara Noto Hadinegoro di Kabupaten Jember, Bandara Iswahyudi di Madiun, Bandara Trunojoyo di Kabupaten Sumenep, serta Bandara di Kabupaten Banyuwangi. Penjajakan rencana pembangunan Bandara perintis di Kabupaten Pacitan dan Pulau Bawean, Kabupaten Gresik sudah dilakukan sejak 2003.

Semburan Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo sejak 29 Mei 2006 hingga kini, menyebabkan kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian, sekolah, serta infrastruktur lainnya, seperti jalan tol, jaringan telepon, listrik, air bersih, gas, dan lainnya, di tiga kecamatan di sekitarnya tenggelam dalam lumpur, sehingga berdampak negatif terhadap aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Ditutupnya ruas Porong-Gempol jalan tol Surabaya-Gempol mengakibatkan kemacetan di jalur-jalur alternatif, yaitu Sidoarjo-Mojosari-Porong dan jalur Waru-tol-Porong. Jalur transportasi Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi, serta kota-kota lain di wilayah timur terhambat oleh kemacetan di jalan raya kawasan Porong. Ini juga menyebabkan tersendatnya

aktivitas produksi di kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur.

II.7 Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pemeliharaan daya dukung dan fungsi lingkungan hidup, pengendalian sumber daya alam, dan penataan ruang harus terus dijaga agar tetap dapat mendukung proses pembangunan yang tengah dijalankan. Untuk itu, pemeliharaan kualitas air sungai, kualitas udara ambien, pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dan pencegahan meluasnya lahan kritis mendapatkan perhatian serius.

II.7.1 Kualitas Air Sungai

Untuk menjamin kelayakan air yang dikonsumsi digunakan ukuran baku dalam menentukan kualitas air, yakni melalui kadar kandungan *biochemical oxygen demand* (BOD). Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 413 Tahun 1987 menetapkan standar baku mutu limbah cair untuk BOD berada pada kisaran 3-6 mg/liter.

Sungai di Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi enam wilayah meliputi, wilayah Sungai Madiun, Sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas Tengah, Sungai Brantas Hilir, Sungai Pekalen Sampean, dan wilayah Sungai Madura. Wilayah Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas paling banyak dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan hidup sehari-hari.

Kadar BOD rata-rata Sungai Brantas selama 2003-2008 cenderung fluktuatif, dan berada di atas ambang batas yang diperkenankan, kecuali pada 2007, kadar BOD mencapai 5,96 mg/liter. Pada 2003, kadar BOD mencapai 8,36, disusul 2004 (7,13); 2005 (7,13); 2006 (6,72), dan 2008 (6,26). Kadar BOD Sungai Bengawan Solo dari tahun ke tahun juga meningkat. Pada 2005, kadar BOD

Sungai

Sungai Bengawan Solo adalah 6,40, kemudian meningkat menjadi 6,91 pada 2006. Sejak 2005, kadar BOD Sungai Bengawan Solo mulai meningkat melewati batas toleransi yang ditetapkan yaitu 6,00.

Namun secara umum, dari tahun ke tahun, kadar BOD Sungai Bengawan Solo lebih rendah daripada Sungai Brantas. Beban limbah cair di Sungai Brantas lebih tinggi daripada Sungai Bengawan Solo. Kualitas air Sungai Bengawan Solo relatif lebih baik dibanding Sungai Brantas.

Potensi sumber daya air Sungai Brantas diupayakan untuk terus dilestarikan, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dikendalikan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sungai Brantas yang berawal dari mata airnya di Sumber Brantas di lereng Gunung Anjasmoro, mengalir ke hilir melewati 11 kabupaten dan 4 kota, meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 12.000 kilometer persegi (dua pertiga wilayah Provinsi Jawa Timur) menuju muaranya di Selat Madura, dengan total panjang alur sungai mencapai 320 kilometer.

Untuk melestarikan potensi sumber daya air di DAS Brantas diupayakan membangun beberapa bendungan di daerah hulu, serta menjaga keutuhan kondisi kawasan sabuk hijau (*green belt area*) di sekeliling waduk serta kawasan tangkapan air di hulunya (*catchment area*). Ada tujuh bendungan besar serbaguna yang telah dibangun,

Di samping untuk melestarikan potensi sumber daya air di DAS Brantas, pembangunan bendungan juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi tersebut agar bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama kelangsungan ketersediaan air bagi berbagai keperluan rumah tangga, perkotaan, industri, perikanan, irigasi, dan lainnya, serta pengembangan energi melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan pariwisata. Ada tujuh bendungan besar serbaguna yang telah dibangun, juga 11 bendung, beberapa

Check dam

check dam, 11 embung, serta delapan PLTA, untuk memanfaatkan potensi sumber daya air.

Untuk mengendalikan daya rusak air di DAS Brantas, guna melindungi aset maupun kawasan strategis dari bencana banjir, telah diselesaikan beberapa bangunan pengendali banjir, seperti bendungan, tanggul-tanggul, normalisasi alur, dan sebagainya.

II.7.2 Kualitas Udara Ambien

Standar baku mutu udara dapat diketahui dari kandungan Nitrogen Oksida (Nox), Karbon Monoksida (CO), Sulfur Oksida (Sox), dan partikel debu. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 129 Tahun 1996 menetapkan standar baku mutu untuk Nox sebesar 0,05 ppm, CO (20 ppm), Sox (0,0a ppm), dan debu (0,26 mg/M³).

Semakin meningkatnya perindustrian dan penggunaan kendaraan bermotor sangat mempengaruhi kualitas udara, khususnya di wilayah perkotaan. Pada 2006, setiap unsur ambien udara memenuhi standar baku mutu, kecuali unsur Nox. Sedangkan pada 2007, unsur yang tidak memenuhi standar baku mutu adalah partikel debu.

Secara umum ambien udara wilayah perkotaan Jawa Timur menunjukkan kualitas yang baik, yang terlihat dari angka Kamb yang semakin meningkat, dari 21,35 pada 2006 menjadi 24,54 pada 2007.

II.7.3 Pengendalian Limbah B3

Bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah suatu sisa kegiatan dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun, yang karena sifat dan konsentrasinya merusak lingkungan hidup atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup

[lainnya](#)

lainnya.

Selama ini belum tersedia data mengenai limbah yang secara komprehensif menggambarkan limbah B3. Namun hasil beberapa studi khusus diketahui, di beberapa daerah di Jawa Timur telah terjadi pencemaran lingkungan yang diindikasikan faktor penyebabnya adalah limbah B3. Pada 2006, rata-rata B3 yang berpotensi mencemari adalah sebesar 10,74% dari total pencemaran yang ada. Sumber pencemaran B3 meliputi sektor industri rumah tangga, pertanian, dan lainnya.

II.7.4 Lahan Kritis

Keberadaan Taman Hutan Raya (Tahura) ditujukan untuk menjaga pelestarian alam, mengembangkan pendidikan dan wisata, juga berperan dalam pemeliharaan kelangsungan fungsi hidrologis Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, DAS Konto, dan DAS Kromong, juga untuk melestarikan mata air sumber Sungai Brantas di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, yang kondisinya sangat memprihatinkan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1992, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 11190/KPTS-II/2002, di Jawa Timur dibentuk kawasan pelestarian alam yang disebut Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo, yang mencakup areal seluas 27.868,30 hektare.

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melalui Balai Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo mengelola kawasan Tahura R. Soerjo seluas 27.868,30 hektare, dengan rincian Tahura seksi wilayah Malang (8.928,30 hektare), Tahura seksi wilayah Pasuruan (4.607,30 hektare), dan Tahura seksi wilayah Mojokerto (11.468,10 hektare), dan Tahura seksi wilayah Jombang (2.864,70 hektare).

Hasil pantauan Citra Landsat (foto udara), Mei 2003, terhadap Tahura R. Soerjo seluas 27.868,30 hektare, terdapat kawasan berhutan sekitar 13.387 hektare, dan sisanya 14.000 hektare tidak berhutan lagi (gundul). Dari areal

gundul

gundul yang dikategorikan lahan kritis itu, 1.500 hektare di antaranya tergolong lahan kritis abadi, yaitu sekitar puncak Gunung Welirang, dan Gunung Arjuno. Dengan demikian, tersisa lahan kritis seluas 12.500 hektare. Penanganan lahan kritis berlangsung setiap tahun melalui kegiatan reboisasi, yang rata-rata per tahun sekitar 1.000 hektare. Sampai 2008, sisa lahan yang masih tergolong kritis berkurang menjadi 8.286 hektare.

Kondisi fisik tiga wilayah Tahura (Malang, Pasuruan, Mojokerto) yang cenderung kering, dan berisi jenis tanaman alang-alang, serta semak belukar, membuat kawasan hutan itu rawan bencana kebakaran saat musim kemarau. Sedangkan Tahura di wilayah Jombang, sebagian besar ditumbuhi tanaman basah, seperti pohon pisang, dan bambu, sehingga aman di musim kemarau.

Hampir setiap tahun, di musim kemarau, kawasan hutan selalu mengalami kebakaran. Jenis tanaman yang terbakar adalah tanaman jati muda, rumput, dan alang-alang. Penyebab bencana kebakaran hutan, hampir 90% karena ulah manusia, seperti api unggun yang tidak dimatikan, puntung rokok milik pendaki yang masih menyala, atau sengaja dibakar oleh masyarakat sekitar untuk membuka lahan. Sisanya, karena faktor alam, seperti letusan gunung atau gesekan ranting-ranting yang kering.

Untuk lahan kritis non-Tahura R. Soerjo, terbagi menjadi dua kategori, yakni lahan kritis dalam kawasan, yaitu dalam kawasan hutan lindung (tidak termasuk areal HPH, ex-HPH, areal bekas tebangan, dan areal hutan mangrove). Dan, lahan kritis luar kawasan, yaitu di luar kawasan hutan (tidak termasuk lahan kritis areal hutan mangrove di luar kawasan hutan).

Luas kawasan hutan dan perairan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi, Nomor 417/Kpts-II/1999, mencapai 1.357.337,07 hektare. Data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, menyatakan sampai dengan 2006, luas lahan

kritis dalam kawasan mencapai 165.619,53 hektare, sedangkan lahan kritis luar kawasan seluas 502.405,68 hektare.

Selama periode 2002-2006, lahan kritis dalam kawasan seluas 91.380,47 hektare, dan lahan kritis luar kawasan seluas 289.543 hektare berhasil direhabilitasi. Sasaran kegiatan rehabilitasi adalah lahan yang memiliki kaitan fungsi kawasan lahan lindung, kawasan hutan lindung di luar kawasan hutan, dan kawasan budi daya untuk usaha pertanian. Rehabilitasi lahan kritis merupakan hal mendesak, karena musibah bencana alam di Jawa Timur akhir-akhir ini disebabkan kerusakan lingkungan, yakni hutan gundul, lahan kritis, dan banyak daerah aliran sungai (DAS) yang rusak.

II.7.5 Bencana Alam

Kondisi wilayah Provinsi Jawa Timur yang terdiri beberapa pegunungan berapi yang masih aktif, dan dilalui sungai-sungai besar, sehingga wilayah ini berpotensi mengalami bencana gunung meletus, dan banjir lava/lahar, banjir bandang, dan longsor. Selain itu, adanya pertemuan antara lempeng tektonik Euro Asia dan Austro India, serta adanya fenomena pemanasan global (*global warming*) mengakibatkan potensi terjadinya gempa, dan bisa menimbulkan tsunami di kawasan selatan Jawa Timur, serta terjadinya angin puting beliung di berbagai daerah.

Beberapa kejadian bencana alam di Jawa Timur, antara lain, bencana tanah longsor dan banjir bandang di Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Jombang, Kediri dan Kabupaten Trenggalek; Bencana banjir di Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Bangkalan, dan Sampang akibat meluapnya sungai-sungai besar di sekitarnya, bahkan banjir di Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik berulang setiap tahun; Aktivitas Gunung berapi Bromo, Gunung Semeru, dan Gunung Lamongan yang masih

berstatus

berstatus waspada; Gempa bumi di Kabupaten Pacitan, Ponorogo dan Tulungagung; serta luapan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo.

II.8. Tata Ruang Wilayah

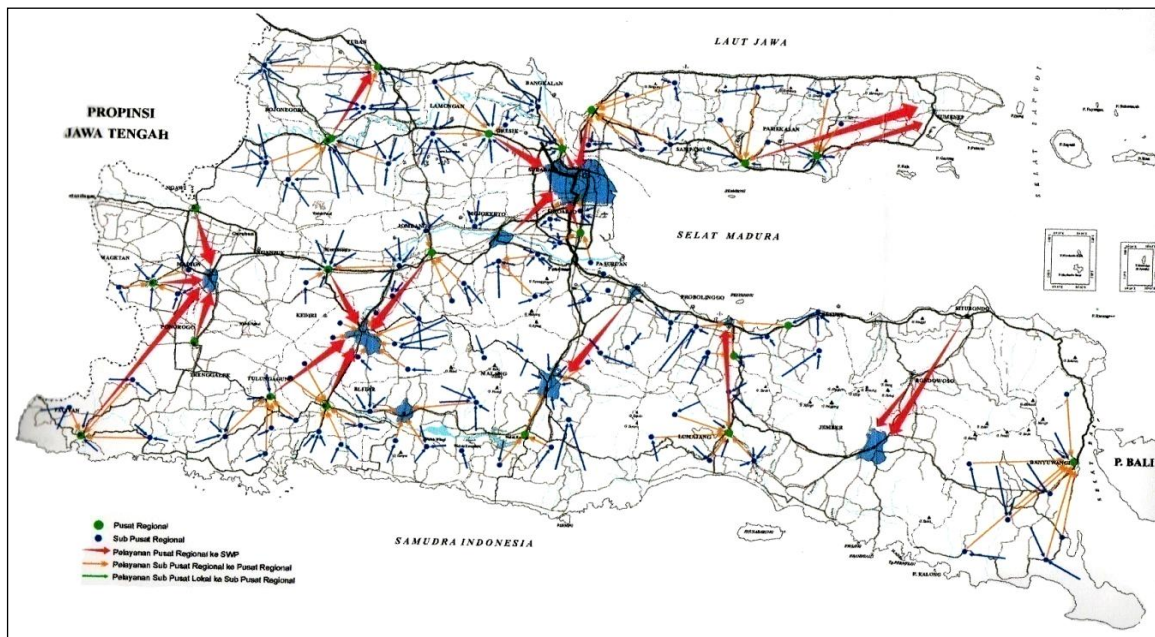
Secara umum perkembangan struktur ruang Jawa Timur mengarah pada dominasi kawasan perkotaan yang mempengaruhi perekonomian wilayah pedesaan. Fenomena urbanisasi dan aglomerasi wilayah terus berkembang mengarah ke hierarki perkotaan lebih besar, sehingga *primacy* kota metropolitan semakin tinggi dibandingkan tingkatan kota-kota lainnya.

Untuk mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan yang cenderung terus membesar, dan berpotensi mendorong perkembangan *mega-urban* tersebut, serta menyeimbangkan perkembangan perkotaan, dan mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di perkotaan serasi dengan kawasan pedesaan sesuai daya dukung, serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, maka struktur ruang wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Timur dibagi menjadi sembilan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP).

Penentuan sembilan SWP di Jawa Timur berdasarkan kecenderungan pergerakan manusia, barang dan jasa, serta karakteristik wilayah. Orientasi pergerakan manusia, barang dan jasa di Jawa Timur cenderung memusat pada titik-titik tertentu, dan mengarah pada wilayah yang telah terlebih dahulu berkembang. Kecenderungan pergerakan tersebut dapat dilihat pada peta berikut:

Gambar II.1

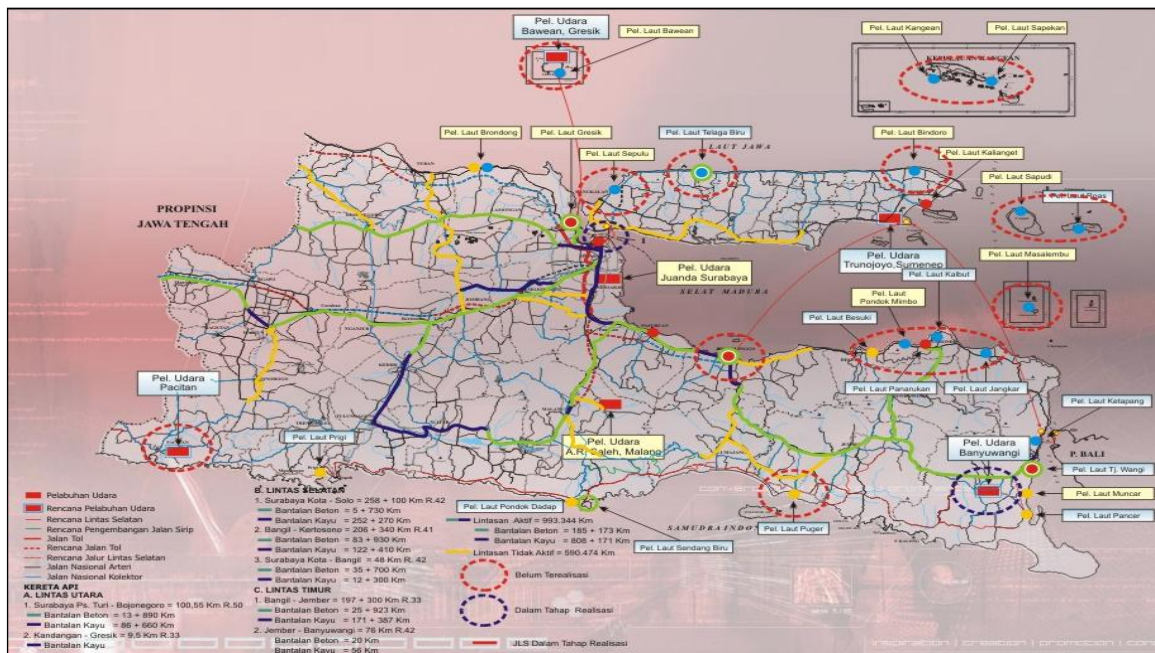
**Gambar II.1 Peta Orientasi Pergerakan Barang dan Jasa
Provinsi Jawa Timur**



Orientasi pergerakan manusia, barang dan jasa perlu ditunjang prasarana wilayah. Gambaran kondisi eksisting prasarana wilayah yang menopang struktur ruang dan kecenderungan pergerakan barang dan jasa itu di samping telah diuraikan dalam sub-bab kondisi prasarana wilayah, dapat pula digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.2

Gambar II.2 Peta Infrastruktur Eksisting Provinsi Jawa Timur



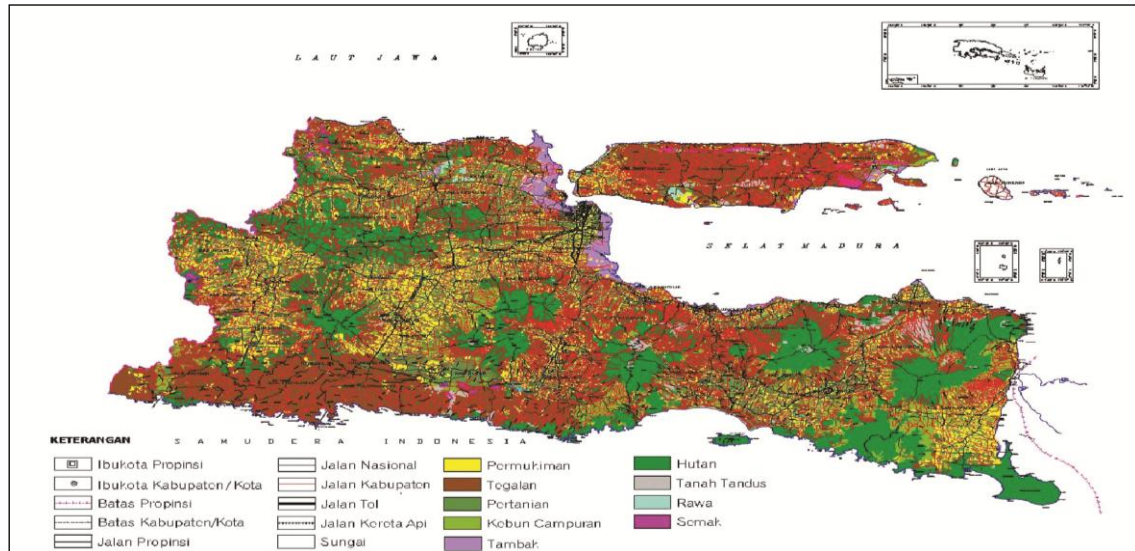
Kecenderungan aktivitas manusia di Provinsi Jawa Timur dapat pula dilihat dari penggunaan lahan --yang mencerminkan seberapa besar pemanfaatan ruang digunakan menopang kegiatan tertentu, sekaligus mencerminkan seberapa besar potensi/pola ruang yang harus dilindungi dan/atau dapat dibudidayakan.

Pola ruang wilayah Jawa Timur sampai dengan tahun 2005 terbagi atas 11,62% kawasan lindung, dan 88,38% kawasan budidaya. Secara lebih lengkap penggunaan lahan eksisting wilayah Jawa Timur tersebut dapat dilihat pada Gambar II.3 dan Tabel II.1. Potensi kawasan budidaya yang sangat besar ini perlu dikelola dan diarahkan pada pencapaian pemanfaatan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Keamanan dapat diterjemahkan sebagai pemanfaatan ruang yang terbebas dari kerawanan bencana; kenyamanan berarti

masih

masih dalam batas daya dukungnya; produktif berarti menghasilkan nilai ekonomi; dan berkelanjutan berarti keseimbangan aspek sosial dan lingkungan hidup.

Gambar II.3 Pola Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur



Tabel II.1 Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur

A Kawasan Lindung		
A.1. Kawasan Suaka Alam		
A.1.1	Cagar Alam	10.947,90
A.1.2	Suaka Margasatwa	18.008,60
A.2. Kawasan Pelestarian Alam		
A.2.1	Taman Nasional	175.994,80
A.2.2	Taman Hutan Raya	27.868,30
A.2.3	Taman Wisata Alam	297,50
A.4. Kawasan Perlindungan Bawahan		
A.4.1	Hutan Lindung	314.719,90
A.4.3	Kawasan Resapan air	0,00

B Kawasan

B Kawasan Budi Daya		
B.1	Kawasan Hutan Produksi	815.851,42
B.2.	Kawasan Pertanian	
B.2.1	Sawah Irigasi	991.678,00
B.2.2	Sawah Tadah Hujan	249.805,00
B.2.3	Pertanian lahan kering/tegalan/kebun campur	1.203.341,27
B.3	Kawasan Perikanan	
B.3.2	Perikanan Tambak	73.760,58
B.4.	Kawasan Perkebunan	
B.4.2	Perkebunan Tanaman Tahunan	158.194,22
B.7	Kawasan Permukiman	571.338,41
B.8	Kawasan Industri	7.403,80
-	Rawa /Danau/Waduk	9.583,90
-	Lain-lain	84.221,07

Kawasan budidaya wilayah Jawa Timur yang didominasi sektor pertanian sebesar 74,11% jika dikaitkan data *leading sector* struktur ekonomi Jawa Timur yang kontributor tertingginya adalah sektor perdagangan, industri dan pertanian, maka keamanan, kenyamanan dan produktivitas lahan RTRW Provinsi Jawa Timur sangat layak lebih diarahkan pada pengembangan kawasan pedesaan yang berorientasi agroindustri/agrobisnis, dan pengembangan kawasan agropolitan. Pengembangan potensi ekonomi pedesaan ini dijalankan dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan hidup demi keberlanjutan pembangunan.